

ANALISIS PEMETAAN AKTOR DAN KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH DESA KAREDOK DALAM KEBIJAKAN CEGAH STUNTING

Taufik Akbar

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2026

Revised September 2026

Accepted September 2026

Available September 2026

takbar@ub.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

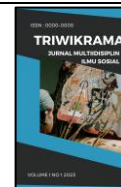
Saat ini stunting menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh berbagai negara di dunia. Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia di perluas dengan ditetapkannya 260 kabupaten atau kota sebagai prioritas pada tahun 2020 yang seiring dengan naiknya alokasi anggaran. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai prioritas penurunan stunting oleh Pemerintah Pusat. Saat ini Kabupaten Sumedang menargetkan Zero New Stunting pada tahun 2023 yang salah satunya terdapat inovasi kebijakan sebagai alat untuk percepatan pencapaian prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Sumedang meminta dukungan dari berbagai stakeholders untuk melaksanakan Zero New Stunting pada tahun 2023 salah satunya adalah Pemerintah Desa di tingkat Desa. Di Kecamatan Jatigede sendiri sebagai kecamatan dengan proporsi balita stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang, terdapat pula salah satu desa yang proporsi balita stunting tertinggi yakni di Desa Karedok dengan angka 24,51%.

Pada saat ini kejadian stunting sudah menjadi permasalahan struktur sosial dan pemaknaan para pemangku atau implementor kebijakan. Untuk dapat melihat bagaimana suatu birokrat dalam menjalankan suatu kebijakan, maka dapat dilihat dari political will atau komitmen politiknya sebagai wujud dari pengalokasian dana pemerintah untuk mencapai hasil kebijakan yang maksimal, kapasitas dan tekanan publik, keterlibatan negara, aturan dan regulasi, juga tanggung jawab seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dedeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh dimensi political will menurut Brinkerhoff, Pemerintah Desa Karedok belum menjalankan sebagian besar indikator dari political will sehingga komitmen politik dari Pemerintah Desa Karedok dalam kebijakan cegah stunting masih goyah dan lemah. Kata kunci: Political Will, Kebijakan, Stunting, Desa

Kata Kunci: *Political Will*, Kebijakan, Stunting, Desa

ABSTRACT

Currently, stunting is a problem experienced by many countries in the world. The stunting prevention policy in Indonesia was expanded with the designation of 260 districts or cities as priorities in 2020, in line with the increase in budget allocations. Sumedang Regency is one of the districts in West Java that has been designated as a priority for reducing stunting by the Central Government. Currently, Sumedang Regency is targeting Zero New Stunting by 2023, one of which is policy innovation as a tool to accelerate the achievement of stunting prevalence. The Sumedang Regency Government is asking for support from various stakeholders to implement Zero New Stunting in 2023, one of which is the Village Government at the Village level. In Jatigede District itself, as the sub-district with the highest proportion of stunted toddlers in Sumedang Regency, there is also one village with the highest proportion of.



Keywords: *Political Will, Policy, Stunting, Village*

1. PENDAHULUAN

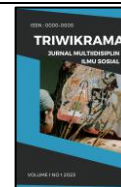
Permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan salah satunya adalah stunting. Menurut World Health Organization (WHO) stunting merupakan sebuah kondisi dimana terjadinya gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi atau kurangnya asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada saat seribu hari pertama kehidupan. Seseorang anak dapat dianggap mengalami kejadian stunting ketika tinggi badannya lebih rendah ataupun lebih pendek dari standar usianya.¹ Jika seseorang anak mengalami keadaan stunting, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia yang antara lain adalah rendahnya kemampuan kognitif, risiko penyakit tidak menular menjadi meningkat, dan kondisi menjadi tidak produktif pada saat anak menginjak usia dewasa.

Saat ini stunting menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh berbagai negara di dunia. Prevalensi stunting secara global adalah 22,9% atau sebanyak 154,8 juta anak di bawah usia 5 tahun yang ada di dunia mengalami kejadian stunting. ³ Dihitung dalam kurun waktu 20 tahun terakhir atau sejak tahun 1990, masalah stunting di dunia ditangani cukup lambat dimana data menunjukkan bahwa presentase anak-anak yang pertumbuhannya terhambat menurun hanya sekitar 0,6 persen per tahunnya. Ketika hal tersebut terus berlangsung maka diprediksi bahwa selama 15 tahun ke depan sekitar 450 juta anak-anak akan mengalami keterlambatan pertumbuhan atau stunting.⁴ Oleh karena hal tersebut WHO mengusulkan bahwa pada tahun 2025 target global penurunan kejadian stunting pada anak yang berusia dibawah lima tahun adalah sebesar 40 persen.

Menurut data yang dilansir dari UNICEF, WHO, dan World Bank pada tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia adalah sekitar 27,7% jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Prevalensi tersebut menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-25 di dunia dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara.⁵ Sedangkan data yang diperoleh dari survei Studi Status Gizi Balita (SSGI) pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Indonesia menurun menjadi 24,4%. Dengan kata lain, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting di atas standar yang ditoleransi oleh WHO yaitu di bawah angka 20%.

Dari data tersebut diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi diantara negara lain yang memiliki pendapatan menengah. Jika masalah stunting ini tidak diatasi dengan baik, maka akan mempengaruhi Indonesia dalam hal kinerja pembangunan yang menyangkut aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan.⁷ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada saat ini stunting menjadi permasalahan utama yang dialami oleh Indonesia untuk meningkatkan upaya kualitas sumber daya manusia pada tahun 2030-2040 nanti yang menjadi bonus demografi dan memerlukan penduduk berkualitas yang berusia produktif.

Stunting sangat berdampak pada penurunan IQ anak di Indonesia sebanyak 10-15 poin. Selain itu, stunting juga berdampak pada penurunan prestasi akademik anak menjadi lebih buruk. Hal tersebut akan berpengaruh secara berkelanjutan ketika anak mulai memasuki usia dewasa dan bekerja, diprediksi anak dengan stunting ketika masuk usia kerja akan meraih pendapatan 20% lebih rendah sehingga akan memperparah kemiskinan dan juga mengancam kelangsungan hidup



pada generasi yang akan datang. Ketika anak-anak lahir dengan sehat, bertumbuh kembang dengan baik, dan memiliki pendidikan yang layak juga berkualitas maka generasi yang akan datang dapat bisa menunjang kesuksesan pembangunan di Indonesia.

Selain menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif pada anak, menurut McDonald dkk (2013) di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika anak-anak yang mengalami kejadian stunting dan kekurangan berat badan tingkat kematiannya tiga kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang gizinya memadai. Oleh karena hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat menanggulangi masalah stunting agar lebih sigap dan tepat lagi karena stunting juga akan berpengaruh terhadap jalannya perkenomian. World Bank mengemukakan bahwa stunting memiliki pengaruh yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas pasar kerja menjadi terhambat dan bahkan dapat memperburuk kesenjangan. Selain itu, World Bank juga mengungkapkan bahwa jika permasalahan stunting ini tidak dapat segera diatasi maka efek jangka panjangnya adalah kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar 2 hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahunnya.

Masyarakat kebanyakan masih belum sadar bahwa anak yang pendek adalah suatu masalah. Mereka memang terlihat normal ketika sedang menjalani aktivitasnya di tengah masyarakat, tidak seperti anak-anak kurus yang terlihat seakan-akan tidak menjalani aktivitas normal dan mereka harus secepatnya ditanggulangi. Pada kenyataannya anak yang pendek juga menjadi masalah krusial bersamaan dengan kesadaran ibu hamil dalam memenuhi gizinya ketika hamil. Banyak ibu hamil di Indonesia masih belum memperhatikan tersebut, bahwa kehamilan sangat banyak berkontribusi terhadap gizi bayi yang akan dilahirkan.

Kebijakan penanggulangan stunting pada tahun 2018 dimulai dengan memprioritaskan sebanyak 160 kabupaten atau kota untuk melaksanakan program penanganan stunting. Kemudian pemerintah memperluas percepatan penanganan stunting menjadi 260 kabupaten atau kota pada tahun 2020 yang seiring dengan naiknya alokasi anggaran. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai prioritas penurunan stunting oleh Pemerintah Pusat. Menurut data yang disebutkan oleh Bupati Sumedang, pada tahun 2021 lalu Kabupaten Sumedang menyentuh angka prevalensi stunting sebesar 24,43%. Pada tahun 2024 ditargetkan terjadi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang menjadi 14,02% yang disesuaikan dengan target nasional.

Pemerintah Pusat memberlakukan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai upaya untuk pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia. Pada tahun 2021, upaya percepatan penurunan stunting semakin digencarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengupayakan penutupan setiap celah potensi risiko yang menjadi penyebab anak lahir stunting. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang menjadi pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi merupakan kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting yang holistik, terintegrasi dan juga berkualitas dengan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi yang baik di antara pemangku kepentingan.¹³ Untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting tentunya Pemerintah Pusat tidak bisa bekerja sendirian sehingga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terdapat berbagai pihak yang diberikan mandat oleh Presiden yang salah satunya adalah Pemerintah Desa.

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 61/PMK.07/2019 mengenai dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi, diketahui bahwa desa juga memiliki peran dalam kebijakan penanggulangan stunting. Sebagai salah satu local government di tingkat desa, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting. Data sasaran untuk intervensi pencegahan stunting diawali dari desa dan dikumpulkan. Selain itu, desa juga harus mengalokasikan dana untuk perbaikan stunting di desanya masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib memastikan bahwa program stunting dapat tepat sasaran. Sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi integrasi intervensi penurunan stunting maka direkrutlah Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berada di tingkat desa.

Saat ini Kabupaten Sumedang menargetkan Zero New Stunting pada tahun 2023 yang salah satunya terdapat inovasi kebijakan sebagai alat untuk percepatan pencapaian prevalensi stunting berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan Sistem Pencegahan Stunting yang hadir berupa aplikasi yakni SIMPATI. Dalam SAKIP Desa, Pemerintah Desa atau dalam hal ini adalah para Kepala Desa wajib untuk membuat perjanjian dengan camat mengenai pencapaian target penurunan prevalensi stunting dengan berpihak kepada anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten sumedang meminta dukungan dari berbagai stakeholders untuk melaksanakan Zero New Stunting pada tahun 2023 salah satunya adalah Pemerintah Desa di tingkat Desa.

Terdapat sebanyak tiga kecamatan di Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2022 ini masih berstatus zona merah atau memiliki proporsi balita stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang yakni Kecamatan Jatigede (19,08%), Kecamatan Surian, (17,39%), dan Kecamatan Tanjungmedar (17,03%). Di Kecamatan Jatigede sendiri sebagai kecamatan dengan proporsi balita stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang, terdapat pula salah satu desa yang proporsi balita stunting tertinggi yakni di Desa Karedok dengan angka 24,51%. 16 Desa Karedok memiliki proporsi stunting tertinggi di Kecamatan Jatigede dibandingkan dengan desa-desa yang juga berstatus tinggi lainnya seperti Desa Cintajaya, (24,44%) Desa Kadu (23,3%), Desa Cisampih (19,33%), Desa Mekarasih (19,2%).

Desa Karedok sendiri merupakan Desa yang aksesnya terbilang cukup jauh dari pusat kota dan dipisahkan oleh Sungai Cimanuk. Selain itu, Desa Karedok juga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat, satu-satunya cara untuk dapat mengakses Desa Karedok hanya dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua melalui jembatan. Berdasarkan survei pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Karedok kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita didapatkan bahwa Pemerintah Desa masih kurang melakukan sosialisasi mengenai perbaikan gizi pada ibu hamil dan perbaikan gizi pada balita. Kemudian didapatkan juga bahwa kebanyakan dari ibu hamil dan ibu yang memiliki balita di Desa Karedok mengatakan bahwa anak yang memiliki tubuh pendek dipercaya sebagai faktor keturunan atau faktor genetik sepenuhnya yang diturunkan dari kedua orang tua anak tersebut, sehingga para orang tua belum merasa perubahan pola asuh dan perbaikan gizi menjadi hal yang penting dalam penanganan masalah stunting.

Pada saat ini kejadian stunting sudah menjadi permasalahan struktur sosial dan pemaknaan para pemangku atau implementor kebijakan.¹⁹ Untuk dapat melihat bagaimana suatu birokrat dalam menjalankan suatu kebijakan, maka dapat dilihat dari political will atau komitmen politiknya sebagai wujud dari pengalokasian dana pemerintah untuk mencapai hasil kebijakan yang maksimal, kapasitas dan tekanan publik, keterlibatan negara, aturan dan regulasi, juga tanggung jawab seseorang. Menurut Brinkerhoff political will memiliki dua elemen yakni niat dan tindakan yang maknanya sama dengan komitmen politik yang dapat diukur melalui lima dimensi yakni



Inisiatif Pemerintah, Prioritas, Mobilisasi Dukungan Politik, Penegakan Hukum, dan Keberlanjutan Usaha.

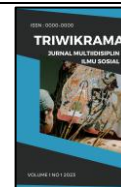
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana political will Pemerintah Desa Karedok dalam implementasi kebijakan cegah stunting.

2. METODE

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian agar dapat memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada analisis political will menurut Brinkerhoff yang meliputi tujuh dimensi yaitu inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, alokasi sumber daya dan komitmen masyarakat, penegakan hukum, keberlanjutan usaha, dan adaptasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karedok dalam melaksanakan kebijakan cegah stunting. Untuk menggambarkan fokus penelitian yakni dimensi political will menurut Brinkerhoff (2010) diperlukan penjelasan yang bersifat spesifik, rinci, dan tegas sehingga keterangan atau informasi yang diperoleh dapat menjelaskan batas-batas tertentu. Dalam penelitian kualitatif, parameter dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengkaji lebih dalam dan mengisi kekosongan yang ada. Oleh karena itu, operasionalisasi parameter dimensi political will dijelaskan pada

Tabel 1.Operasionalisasi Parameter

No	Dimensi	Indikator
1	Inisiatif Pemerintah	Memiliki sumber dorongan dalam memberlakukan kebijakan Berorientasi terhadap perubahan Sumber dorongan berasal sepenuhnya dari aktor kebijakan
2	Prioritas	Memilih kebijakan berdasarkan pertimbangan teknis yang matang Dapat menganalisis pilihan yang seimbang Pemangku kebijakan dapat menetapkan kebijakan dengan manfaat yang besar
3	Mobilisasi Dukungan Politik	Kemampuan pemangku kebijakan menjangkau seluruh suara masyarakat dan sektor swasta Kemampuan pemangku kebijakan dalam melibatkan masyarakat dan sektor swasta untuk mengadvokasi terwujudnya perubahan
4	Alokasi Sumber Daya dan Komitmen Masyarakat	Mengalokasikan sumber daya (anggaran) untuk mencapai tujuan kebijakan secara maksimal Terdapat dorongan dari masyarakat baik itu dalam memberikan saran maupun pengaruh lainnya pada suatu kebijakan
5	Penegakan Hukum	Penerapan sanksi yang efektif ketika kebijakan tidak terlaksana dengan maksimal Pemberian hadiah atau reward ketika kebijakan dilakukan dengan niat yang serius dan maksimal
6	Keberlanjutan Usaha	Menyediakan sumber daya dan upaya yang bersifat jangka panjang Program yang dibuat tidak hanya berlaku pada suatu saat tertentu
7	Adaptasi dan Pembelajaran	Mempelajari praktik kebijakan yang baik dan berhasil dari pemangku kebijakan lainnya. Memilih secara selektif hal-hal apa saja yang dapat diadaptasi dan diterapkan untuk kebijakan pada daerah pemerintahan pemangku kebijakan itu sendiri.



Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan pada akhirnya akan menciptakan suatu kesimpulan.⁵¹ Objek penelitian dapat dimaknai juga sebagai hal yang diteliti untuk mendapatkan tujuan tertentu. Oleh karena itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Karedok. Sedangkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, dalam penelitian ini lokasinya bertempat di Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik penentuan informan secara snowball atau cara penentuan informan yang ditetapkan secara non-probability. Teknik penentuan informan snowball. adalah teknik menentukan informan yang semula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penelitian ini, peneliti pertama-tama hanya memilih 3 orang informan yakni Kepala Desa Karedok, KPM Desa Karedok, dan PLKB Desa Karedok tetapi karena data yang didapatkan dirasa masih belum lengkap, maka dari itu peneliti mencari informan lain sebagai pelengkap dari data yang diteliti. Sehingga dapat ditentukan bahwa informan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Kepala Desa Karedok yakni Bapak Waluyo. Kepala Desa Karedok sebagai informan karena memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa yang melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam kebijakan terkait stunting.
2. Sekretaris Desa Karedok yakni Bapak Warya Saputro. Sekretaris Desa dipilih sebagai informan karena memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam pemegangan kekuasaan dan pengelolaan terutama yang menyangkut keuangan desa. Selain itu, Sekretaris Desa Karedok juga merupakan salah satu perangkat desa yang telah bertugas dengan periode terlama di Desa, sehingga dapat memberikan banyak keterangan mengenai program kebijakan pencegahan stunting dari Kepala Desa periode sebelumnya.
3. Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) Desa Karedok yakni Ibu Ika yang diberikan tugas oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang di lapangan (Desa Karedok). PLKB Desa Karedok dipilih karena memiliki peran sebagai komunikator, motivator, dan pengembang kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan cegah stunting di lingkungan desa.
4. Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Karedok yakni Ibu Erma sebagai mitra Pemerintah Desa. KPM Desa Karedok adalah masyarakat desa terpilih yang memiliki kepedulian dan dengan sukarela berdedikasi untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam program monitoring serta memfasilitasi konvergensi penuruan dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, KPM Desa Karedok dipilih sebagai informan dalam penelitian ini.
5. Bidan Desa yakni Ibu Wina sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Puskesmas Jatigede di Desa Karedok. Bidan Desa dipilih sebagai informan karena memiliki tugas tambahan yakni sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Tingkat Desa yang memiliki tugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.
6. Masyarakat Desa Karedok yakni ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak balita. Ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak balita yang dipilih sebagai informan adalah Ibu

Nia karena merupakan perwakilan masyarakat yang menjadi sasaran objek kebijakan stunting dan sesuai kriteria yakni ibu hamil dan memiliki anak balita.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses pengorganisasian data yang dilakukan secara terorganisir dari awal hingga akhir penelitian. Data yang telah dikumpulkan yang terbagi menjadi data primer yakni data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan dan data-data lain yang didapatkan dari laporan di tempat penelitian, serta data sekunder dimana data-data ini adalah data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejadian Stunting di Kabupaten Sumedang

Di Kabupaten Sumedang kejadian stunting sangat diperhatikan dan menjadi urgensi sejak ditetapkannya Kabupaten Sumedang sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota yang berstatus prioritas penurunan stunting oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2013, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menetapkan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu kabupaten prioritas karena Sumedang memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi yakni sebesar 41,08%. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Sumedang menjadi fokus pemerintah pusat beserta dengan desa-desa yang ada di dalamnya. Desa-desa yang dimaksud adalah desa yang memiliki karakteristik seperti penghasilan perkapita yang rendah sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab angka stunting yang tinggi.

Gambar 1. Proporsi Balita Stunting di Kabupaten Sumedang pada Bulan Penimbangan Februari Tahun 2022



Sumber: SIMPATI App, 2022

Berdasarkan kepada wawancara yang peneliti lakukan kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Karedok Ibu Erma membenarkan bahwa pada saat ini Desa Karedok memiliki proporsi balita stunting yang tinggi bahkan tertinggi di Kecamatan Jatigede. Penjelasan tersebut didapatkan oleh peneliti: "... iya memang betul angka stuntingnya tinggi, bahkan bulan Februari kemarin ada 24% lebih yang stunting."⁶² Menurut data proporsi balita stunting di Kabupaten Sumedang terbaru pada bulan penimbangan Agustus tahun 2022 menunjukkan bahwa Kecamatan Jatigede menjadi satu-satunya Kecamatan yang masih berstatus zona merah (proporsi balita stunting tinggi) di Kabupaten Sumedang, pada saat kecamatan lainnya mengalami penurunan proporsi balita stunting bahkan terdapat satu kecamatan yang berstatus zero stunting atau terbebas dari stunting

*Corresponding author

E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

dimana di Kecamatan Cisarua tidak ditemukan balita yang mengalami kejadian stunting. Hal tersebut tentunya menjadi urgensi bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Jatigede.

Gambar 2. Proporsi Balita Stunting di Kabupaten Sumedang pada Bulan Penimbangan Agustus Tahun 2022



Sumber: SIMPATI App, 2022

Di Kecamatan Jatigede sendiri terdapat desa-desa di dalamnya yang memiliki kasus stunting dengan proporsi yang tinggi berdasarkan bulan penimbangan Februari tahun 2022. Dari total sebanyak 11 (sebelas) desa yang terletak di Kecamatan Jatigede terdapat 5 desa yang statusnya zona merah atau desa dengan proporsi balita yang tinggi. Diurutkan dari yang terbesar desa-desa tersebut antara lain adalah Desa Karedok (24,51%), Desa Cintajaya (24,44%), Desa Kadu (23,3%). Desa Cisampih (19,33%), dan Desa Mekarasih (19,3%). Data proporsi balita stunting di Kecamatan Jatigede berdasarkan desa-desa yang terletak di Kecamatan Jatigede dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut ini: Gambar 4.5 Proporsi Balita Stunting di Kecamatan Jatigede pada Bulan Penimbangan Februari Tahun 2022.

Gambar 3. Proporsi Balita Stunting di Kecamatan Jatigede pada Bulan Penimbangan Februari Tahun 2022



Sumber: SIMPATI App, 2022

Berdasarkan dari data proporsi balita stunting pada bulan penimbangan Februari tahun 2022 tersebut, diketahui bahwa Desa Karedok merupakan desa dengan proporsi kejadian stunting tertinggi di Kecamatan Jatigede yang juga adalah kecamatan dengan proporsi kejadian stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang.

Terdapat data proporsi balita stunting terbaru yakni pada bulan penimbangan Agustus tahun 2022 yang menunjukkan penurunan di beberapa desa yang semula berstatus sebagai zona merah, berhasil menurunkan proporsi balita stunting sehingga tidak menjadi desa yang zona merah lagi. Namun demikian, masih terdapat beberapa desa yang berstatus zona merah atau dengan kata lain proporsi kejadian stunting pada balita di desa tersebut masih tinggi yakni di tiga desa di Kecamatan Jatigede antara lain adalah Desa Karedok (24,24%), Desa Cintajaya (23,46%), dan Desa Cisampih (20%).

Gambar 4. Proporsi Balita Stunting di Kecamatan Jatigede Bulan Penimbangan Agustus 2022

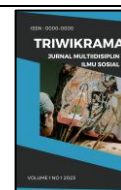


Sumber: SIMPATI App, 2022

Dari sebanyak 11 (sebelas) desa yang terletak di Kecamatan Jatigede, ketiga desa yang masih berstatus zona merah pada gambar 5.4 merupakan desa yang sebelumnya pada penimbangan bulan Februari tahun 2022 juga mengalami hal yang sama yakni tingginya proporsi balita stunting. Jika diurutkan berdasarkan proporsinya, Desa Karedok masih berada pada angka yang tinggi meskipun telah menurun dari bulan penimbangan Februari sebanyak 0,27% saja. Penurunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penurunan yang signifikan melihat terdapat 2 desa lainnya yang berhasil mengubah statusnya menjadi zona dengan proporsi balita stunting sedang atau zona oranye. Sedangkan data keseluruhan atau data dari kesebelas desa yang terdapat di Kecamatan Jatigede pada bulan penimbangan Agustus tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Proporsi Balita Stunting Bulan Penimbangan Agustus Tahun 2022 Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatigede No Nama Desa/Kelurahan Proporsi Stunting 1 Mekarasih 15,38% 2 Ciranggem 15,79% 3 Cisampih 20,00%

Tabel 2. Proporsi Balita Stunting Bulan Penimbangan Agustus Tahun 2022 Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatigede

No	Nama Desa/Kelurahan	Proporsi Stunting
1	Mekarasih	15,38%
2	Ciranggem	15,79%
3	Cisampih	20,00%
4	Karedok	24,24%
5	Kadu	16,98%
6	Lebaksiuh	12,63%
7	Cintajaya	23,46%



8	Cipicung	14,81%
9	Cijeungjing	17,81%
10	Kadujaya	11,67%
11	Jemah	8,45%

Sumber: SIMPATI App, 2022

diketahui bahwa desa dengan kejadian stunting yang tinggi terdapat di Desa Karedok. Meskipun terdapat penurunan dari bulan penimbangan sebelumnya, namun penurunannya tidak cukup signifikan sehingga Desa Karedok masih tetap menjadi desa dengan proporsi balita stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang. Di Desa Karedok sendiri, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi faktor dari penyebab tingginya proporsi stunting pada balita di Desa Karedok berdasarkan pada wawancara kepada informan yakni Kepala Desa Karedok, PLKB Desa Karedok, Kader Pembangunan Manusia Desa Karedok, dan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Karedok.

Sanitasi dan Air Minum

Selain faktor langsung dari nutrisi ibu maupun balita, stunting juga dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor tidak langsung yang bersumber dari berbagai aspek yakni water, sanitation, and hygiene (WASH) atau sumber air minum, kualitas fisik air minum, dan kepemilikan jamban.⁶⁶ Kejadian stunting sangat erat kaitannya dengan kejadian infeksi berulang dalam waktu yang cukup lama. Pemicu infeksi tersebut berhubungan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti tidak tersedianya akses terhadap air bersih dan masyarakat tidak memiliki sanitasi yang layak. Oleh karena hal tersebut, sanitasi dan ketersediaan air bersih memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah dan menurunkan kejadian stunting karena juga merupakan salah satu upaya sebagai pencegahan infeksi penyakit.⁶⁷ Kualitas fisik air minum yang layak untuk dikonsumsi tentunya tidak terlepas dari sumber air minum itu sendiri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang aman bagi kesehatan menjelaskan bahwa air minum yang layak apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi, dan radioaktif. Sedangkan parameter yang dapat digunakan untuk melihat apakah kualitas

fisik dari air minum tersebut baik atau tidak, maka dapat dilihat dengan tidak keruh, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Begitu pula halnya yang terjadi di Desa Karedok, berdasarkan wawancara kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Karedok Ibu Erma menjelaskan bahwa: “...kejadian stunting ini berdasarkan teori memang disebabkan oleh pola makan, tetapi di Desa Karedok ini 15% disebabkan oleh pola sanitasi... justru di Karedok itu ODF nya masih rendah, kebanyakan yang memiliki WC tetapi tidak punya septic tank, pembuangannya langsung ke sungai... ke sungai-sungai kecil.”

Gambar 5. Sungai Kecil di Desa Karedok yang Dijadikan Pembuangan Akhir oleh Masyarakat Desa

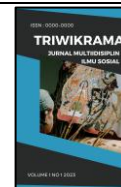


Hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Kepala Desa Karedok yakni Bapak Waluyo diketahui bahwa tingginya proporsi balita yang mengalami kejadian stunting di Desa Karedok terjadi karena faktor lingkungan yakni sanitasi dan akses terhadap air bersih. Dimana Kepala Desa Karedok memberikan pernyataan kepada peneliti bahwa: “...pada saat ini, Desa Karedok masih belum berstatus sebagai Desa ODF atau Open Defecation Free. Tidak ODF-nya Desa Karedok ini dikarenakan buang air besar masih ada yang ke selokan... ketika membuat septic tank di Desa Karedok begitu tanahnya digali langsung keluar air. Jadi wilayahnya tidak bisa digali dalam-dalam terutama di Desa Karedok bagian sebelah Barat.”

Dari pernyataan Kepala Desa Karedok tersebut menjelaskan bahwa pada saat ini Desa Karedok masih belum berstatus sebagai desa yang Open Defecation Free (ODF) yakni Desa Karedok masih membiarkan pembuangan kotoran atau tinja ke ladang, hutan, semak-semak, sungai, atau area terbuka lainnya sehingga dibiarkan menyebar dan menkontaminasi lingkungan, tanah, udara, dan air di sekitar desa. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masyarakat di Desa Karedok sebagian besar tidak memiliki septic tank. Desa Karedok memiliki karakteristik tanah yang ketika digali dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam pun tanah tersebut akan mengeluarkan air. Jika sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengetahuan Masyarakat terhadap Stunting

Selain karena faktor lingkungan, terdapat juga faktor individu dari masyarakat itu sendiri yang memiliki peranan sangat penting dalam terjadinya stunting kepada balita. Di Desa Karedok sendiri, peneliti menemukan bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Karedok yakni Bapak Waluyo, mengungkapkan bahwa masyarakat masih belum melek atau sadar dengan kejadian stunting ini, terlebih lagi, kebanyakan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak balita tidak menyadari bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi tumbuh kembang.

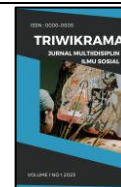


4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian berjudul Analisis Political Will Pemerintah Desa Karedok dalam Kebijakan Cegah Stunting peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingginya proporsi balita stunting di Desa Karedok pada tahun 2022 (24,24%) disebabkan oleh beberapa hal yakni sanitasi di Desa Karedok yang masih belum layak atau Desa Karedok belum berstatus sebagai Desa Open Defecation Free (ODF), sumber air di Desa Karedok memiliki kualitas fisik yang kurang layak untuk dikonsumsi karena kandungan kalsiumnya yang tinggi dan tercemar oleh limbah kotoran, kesadaran masyarakat dalam memberikan pola makan yang baik bagi anak balitanya masih kurang sehingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) anak tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam pemenuhan gizi, dan komitmen politik dari Pemerintah Desa Karedok masih belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan teori political will atau komitmen politik menurut Brinkerhoff (2010) yang dibagi ke dalam 7 dimensi bahwa Pemerintah Desa Karedok masih belum memiliki komitmen politik yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar indikator dari political will belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Desa Karedok sehingga komitmen politik dari Pemerintah Desa Karedok dalam kebijakan cegah stunting masih goyah dan lemah. Selain menyajikan kesimpulan, penulis diharapkan menjelaskan implikasi teoretis, praktis, maupun kebijakan yang dihasilkan dari penelitian. Apabila terdapat keterbatasan penelitian yang berpengaruh terhadap ruang lingkup atau interpretasi hasil, penulis dapat menyampaikannya secara singkat sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. Penjelasan mengenai implikasi penelitian harus menunjukkan manfaat hasil penelitian bagi pengembangan teori, praktik, maupun penelitian lanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

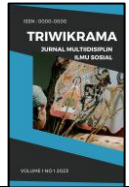
- Ahmad Sururi, 2016, 'Inovasi Kebijakan Publik', Jurnal Sawala, vol. 4, no. 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, 2022, Ringkasan Per Wilayah Proporsi Balita Stunting. Bambang Margono, dkk., 2003, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta, Inti Ilmu.
- Brinkerhoff, D. W., 2010. 'Unpacking the concept of political will to confront corruption', U4BRIEF Anti- Corruption Resource Centre.
- Budiastutik dan Rahfiludin, 2019, 'Faktor Risiko Stunting pada Anak di Negara Berkembang', Amerta Nutrition.
- Cahyono, dkk., 2016. 'Faktor Penentu Stunting Anak Balita pada Berbagai Zona Ekosistem di Kabupaten Kupang, Jurnal Gizi Pangan.
- Cegahstunting.id, 2020, Seberapa Penting Sanitasi dalam Mencegah Stunting, diakses melalui cegahstunting.id pada tanggal 20 September 2022 <https://cegahstunting.id/berita/seberapa-penting-sanitasi-dalam-mencegah-stunting/>.
- Cegahstunting.id, 2021, Konvergensi Pencegahan Stunting di Tingkat Desa, diakses dari cegahstunting.id pada tanggal 15 April 2022.
- Detik.com, 2022, Sumedang Akan Bagi Pengalaman Penanganan Stunting di Ajang G20, diakses melalui detik.com pada tanggal 20 September 2022.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2019. Profil Kesehatan Kabupaten Sumedang 2019. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2019. Open Data Jabar.



- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, 2022, Proporsi Balita Stunting di Kecamatan Jatigede.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Fauzy Achmad, 2015, 'Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012', JOM FISIP, vol. 2, no. 2.
- Gerston LN, 1992, Public Policy Making in A Democratic Society: A Guide to CIVIC Engagement, New York, M.E Sharp.
- Ghony dan Almanshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar- ruzz Media
- Hasanah, Handayani, Wilti, 2021, 'Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia (Studi Literatur)', Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L), Vol. 02, No. 2
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021, Percepatan Penurunan Stunting di Desa.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2016.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Ini Penyebab Stunting pada Anak, diakses melalui kemkes.go.id pada tanggal 19 September 2022 <https://www.kemkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Warta Kesmas, Edisi 02.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021, Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022.
- Kementrian PANRB, 2021, Sakip Desa, Implementasikan Reformasi Birokrasi dari Level Desa, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sakip-desa-implementasikan-reformasi-birokrasi-dari-level-desa>.
- Kementrian PPN (Bappenas), 2018.
- Kusumawati, Rahardjo, Sari, 2015, 'Model Pengendalian Faktor Risiko Stunting pada Anak Usia di Bawah Tiga Tahun', Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 9, No. 3
- Latifa Suhada Nisa, 2018, 'Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia', Jurnal Kebijakan Pembangunan, vol. 3, no. 21.
- Lestari dkk., 2018, 'Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember', Jurnal Aspirasi, vol. 9, no. 1.
- Martha, E., & Kresno, S. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan. Jakarta: Rajawali Press
- Martha, E., & Kresno, S. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press.



- Mastaldiah, 2020, Political Will Pemerintah Kota Palembang dalam Mengatasi Stunting, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mitra, 2015, 'Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan)', Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol. 2, No. 6.
- Moleong Lexy J, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustika Ratnaningsih, Ira Citra Ningrom, Ratna Wulan, 2020, 'Gerakan Bersama Kenali, Cegah, dan Atasi Stunting Melalui Edikasi Bagi Masyarakat di Desa Padamara Kabupaten Purbalingga', AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, vol.2, no.1.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2022, Pemkab Fokus Turunkan Angka Stunting, diakses melalui sumedangkab.go.id pada 18 September 2022.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2022, Penurunan Angka Stunting Sumedang Tergolong Tinggi Secara Nasional, diakses melalui sumedangkab.go.id pada 18 September 2022.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang, Program Inovatif Baru dari DPPKB, diakses dari sumedangkab.go.id pada tanggal 15 April 2022 <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/program-inovatif-baru-dari-dppkb>.
- Rahayu. A, Khairiyati, L., 2014, 'Resiko Pendidikan Ibu Terhadap Kejadian Stunting pada Anak 6-23 Bulan', Nutrition and Food Research, Vol. 37, No. 2.
- Rahman dkk., 2021, 'Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih)', E-Jurnal Karta Rahardja 2021, vol. 3, no. 1.
- Ramadhan, Ramadhan, 2017, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', Jurnal Publik, vol. 11, no. 1.
- Riant Nugroho, 2014, Public Policy Teori Manajemen Dinamika Analisis Konvergensi dan Kimia Kebijakan, Jakarta, IKAPI. S.W. TNP2K, 2018.
- SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) App, Database Balita Penimbangan Bulan Februari dan Agustus tahun 2022, diakses melalui <https://pwa.simpati.app/eksekutif>.
- Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetjningsih, 2012, Perkembangan Anak dan Permasalahannya dalam Buku Ajar I Ilmu Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Sagungseto
- Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021, Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tahun 2021.
- Subagyo, 2004, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta.



Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*, Bandung: Alfabeta

Tati Sarihati, 2018, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program Larasita di Kabupaten Karawang', *SOSPOL: JURNAL SOSIAL DAN POLITIK*, Vol. 23, No. 2.

Thomas R. Dye, 1992, *Understanding Public Policy*, New Jersey, Englewood. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2013. Trijuliana, Rizki, Argenti, 2020, 'Komitmen Politik: Penegakan Hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting', *Journal of Government and Political Studies*, Vol. 3, No. 2.